

PERSATOEAN MANOESIA:
JALAN TENGAH PERSIMPANGAN GERAKAN PEREMPUAN
INDONESIA AWAL ABAD KE 20

Krida Amalia Husna
Universitas Khairun
email: kridaamaliahusna@unkhair.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bermaksud untuk menampilkan kajian mengenai salah satu pidato yang disampaikan dalam Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 yaitu pidato berjudul *Persatoean Manoesia* yang disampaikan oleh Siti Hajinah. Kajian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pandangan tokoh pergerakan Islam modern mengenai gerakan perempuan dan bagaimana ia memposisikan gerakan Islam modern terhadap berbagai pandangan dalam gerakan perempuan pada masa itu. Penelaahan dengan metode sejarah menghasilkan kesimpulan bahwa dalam pidatonya Siti Hajinah menekankan pentingnya persatuan dan harmoni dalam mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Hajinah menekankan persatuan bukan berarti penyeragaman, tetapi kerja sama yang erat demi keselamatan dan kemerdekaan bangsa.

Kata Kunci: Siti Hajinah, Aisyiyah, Kongres Perempuan Indonesia

Abstract

This paper aims to present a study of one of the speeches delivered at the 1928 Indonesian Women's Congress, entitled "Persatoean Manoesia" (Persatoean Manoesia), delivered by Siti Hajinah. This study aims to examine the views of modern Islamic movement figures on the women's movement and how she positioned the modern Islamic movement in relation to various views within the women's movement at that time. The historical analysis concludes that in her speech, Siti Hajinah emphasized the importance of unity and harmony in achieving happiness and prosperity. Hajinah emphasized that unity does not mean uniformity, but rather cooperation for the safety and independence of the nation.

Keywords: Siti Hajinah, Aisyiyah, Indonesian Women's Congress

Pendahuluan

Pasca Sumpah Pemuda pada Oktober 1928, semangat persatuan mulai menjalar ke berbagai lini, termasuk gerakan perempuan. Sebelum tahun 1928, organisasi perempuan umumnya masih bersifat kedaerahan atau berbasis agama. Para tokoh perempuan saat itu merasa perlu adanya wadah tunggal untuk menyatukan visi dalam melawan kolonialisme sekaligus memperbaiki status sosial perempuan yang saat itu masih terkekang oleh adat, pernikahan dini, dan kurangnya akses pendidikan (Vreede-de Stuers, 2008: 89). Gerakan ini juga dipicu oleh kesadaran bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan aktif kaum perempuan dalam ranah publik dan politik (Blackburn, 2007: 12).

Latar belakang ini mencetuskan penyelenggaraan Kongres Perempuan di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928. Kongres ini dilaksanakan di Pendopo Dalem Jayadipuran. Sekitar 30 organisasi perempuan mengirimkan delegasinya dengan total peserta mencapai 600 hingga 1.000 orang (Wieringa, 2010: 72).

Sejumlah tokoh perempuan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kongres ini, antara lain R.A. Soekanto sebagai Ketua Kongres yang memimpin jalannya diskusi dengan fokus pada persatuan organisasi perempuan; Siti Sundari yang merupakan seorang sarjana hukum yang memberikan pidato menggugah tentang pentingnya nasionalisme dan kewajiban perempuan sebagai "ibu bangsa" (Vreede-de Stuers, 2008: 92); Dan Nyi Hajar Dewantara yang aktif dalam memberikan pandangan mengenai pentingnya pendidikan bagi anak perempuan sebagai pondasi keluarga.

Banyak organisasi perempuan yang terlibat dalam kongres ini, antara lain Wanito Utomo, Putri Indonesia, Aisyiyah, hingga sayap wanita dari organisasi kepemudaan seperti Jong Java dan Jong Islamieten Bond (Kowani, 2008). Masing-masing organisasi mengirimkan perwakilannya dan menyampaikan beragam pandangan mengenai perempuan dalam kongres ini. Menurut Blackburn (2007), kongres ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan forum intelektual yang menuntut perubahan struktur sosial. Tiga mosi utama yang dihasilkan adalah perlunya pemberian beasiswa bagi anak perempuan, perbaikan sistem perkawinan (mencegah pernikahan paksa), dan pemberian tunjangan bagi janda serta anak yatim.

Tulisan ini bermaksud untuk menampilkan kajian mengenai salah satu pidato yang disampaikan dalam Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 yaitu pidato berjudul *Persatoean Manoesia* yang disampaikan oleh Siti Hajinah. Kajian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pandangan tokoh pergerakan Islam modern mengenai gerakan perempuan dan bagaimana ia memposisikan gerakan Islam modern terhadap gerakan perempuan pada masa itu.

Metode Penelitian

Metode sejarah digunakan dalam kajian ini. Penulis melakukan analisis berdasarkan sumber-sumber pustaka yang membahas mengenai sejarah pergerakan perempuan Indonesia dan Kongres Perempuan tahun 1928.

Siti Hajinah

Siti Hajinah lahir di Kauman, Yogyakarta, sebuah lingkungan yang menjadi pusat pembaruan Islam di Indonesia. Ayahnya Haji Mohammad Narju, seorang pengusaha batik sukses dan aktivis Muhammadiyah. Siti Hajinah menempuh pendidikan formal di Sekolah Netral (Neutraal Meisjes School). Ia juga pernah masuk Holland Inlandsche School (HIS) dan Fur Huischoud School di Yogyakarta. Pendidikan Agama diperoleh langsung dari ayahnya dan melalui pengajian yang dipimpin oleh Nyai Ahmad Dahlan.



Gambar 1
Siti Hajinah

Mengikuti jejak ayahnya, Siti Hajinah aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Ia merupakan kader Aisyiyah, organisasi perempuan Muhammadiyah. Pada usia 19 tahun Siti Hajinah telah ditunjuk sebagai sekretaris Hoofdbestuur Muhammadiyah bagian 'Aisyiyah. Bergabungnya Siti Hajinah dalam organisasi perempuan Muhammadiyah membawanya terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan yang dicanangkan oleh organisasi tersebut. Pemberantasan buta aksara dan penguatan peran publik perempuan melalui nilai-nilai Islam menjadi salah satu agenda penting Aisyiyah pada masa itu (Wieringa, 2010: 71).

Pada tahun 1928, saat usianya masih 22 tahun Siti Hajinah terpilih menjadi anggota panitia Kongres Perempuan Indonesia I yang diadakan di Yogyakarta. Ia tidak hanya berperan sebagai pengelola acara, tetapi juga sebagai orator ulung (Blackburn, 2007: 14).

Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa perempuan memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan kualitas diri agar dapat menjadi pendidik utama bagi generasi penerus bangsa. Ia berargumen bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat bergantung pada derajat kesopanan dan pendidikan kaum perempuannya (Vreede-de Stuers, 2008: 94).

Persatoean Manoesia

Siti Hayinah adalah satu di antara dua perempuan representasi 'Aisyiyah, yang menjadi anggota pimpinan Kongres Perempuan Indonesia Pertama, yang berlangsung dari tanggal 22-25 Desember 1928. Siti Hayinah berkesempatan untuk berbicara di depan kongres, pada rapat umum ketiga, tanggal 25 Desember 1928. Pidatonya diberi judul "Persatoean Manoesia" disampaikan dalam Bahasa Melayu. Pidato Siti Hajinah Mawardi merupakan dokumen pemikiran yang kaya akan metafora biologis dan sosiologis yang sangat maju pada masanya. (Muarif&Setyowati, 2014).

Pidato Siti Hajinah setidaknya memuat tiga hal berikut:

1. Metafora Organisme: Harmoni dalam Perbedaan

Hajinah menganalogikan manusia sebagai sebuah "badan" di mana tangan, kaki, dan mata memiliki fungsi berbeda namun tetap satu kesatuan. Secara sosiologis, pemikiran ini sejalan dengan konsep solidaritas organik yang menekankan bahwa keberagaman fungsi sosial justru menjadi pengikat persatuan (Martyn, 2005). Ia menekankan bahwa perbedaan profesi dan ras bukanlah alasan untuk perpecahan, melainkan syarat mutlak untuk saling melengkapi.

2. Kritik Terhadap Individualisme dan Interdependensi

Hajinah menegaskan bahwa manusia berbeda dengan binatang karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Ia menuliskan, "hidupnya manusia mulai baru lahir dari kandungan ibunya sampai mati, itu selalu membutuhkan teman." Hal ini menunjukkan kesadaran Hajinah akan pentingnya modal sosial (social capital) dalam membangun kekuatan bangsa (Blackburn, 2004). Di tengah kungkungan adat yang membatasi ruang gerak perempuan, Hajinah menggunakan argumen interdependensi ini untuk membuktikan bahwa laki-laki dan negara tidak akan bisa tegak tanpa dukungan perempuan.

3. Persatuan sebagai Strategi Perlawanan

Hajinah secara cerdas menyebut persatuan sebagai "senjata" untuk mencari kebahagiaan dan kemakmuran. Penggunaan diksi "senjata" dalam konteks kolonialisme menyiratkan bahwa persatuan perempuan adalah bentuk perlawanan politik (resistance) terhadap penjajahan (Wieringa, 2002). Ia

mengingatkan bahwa tanpa kedamaian dan persatuan, bangsa akan mudah difitnah dan diceraai-berai oleh pihak luar.

Perempuan di Simpang Jalan: Konteks Sosial Budaya

Pidato Siti Hajinah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya yang sedang berlaku pada saat itu. Pada tahun 1928, perempuan Indonesia berada di persimpangan jalan antara tradisi feodal/patriarki dan arus modernitas kolonial. Siti Hajinah menekankan bahwa "manusia tidak bisa hidup sendirian," yang merupakan kritik halus terhadap isolasi perempuan di ranah domestik (pingitan).nHajinah menekankan bahwa manusia butuh guru, dokter, dan tukang kayu. Ini mencerminkan realitas bahwa untuk maju, perempuan tidak bisa hanya mengandalkan struktur keluarga tradisional, tetapi harus masuk ke dalam struktur sosial yang lebih luas (organisasi).

Siti Hajinah melalui pidatonya mencoba menjembatani jurang antara pandangan tradisional dan modern mengenai peran perempuan. Pandangan Tradisional menekankan peran perempuan hanya sebagai konco wingking (teman di belakang/urusan dapur). Hajinah tidak menolak peran domestik, namun ia memperluas maknanya. Ia menyebutkan bahwa manusia butuh makanan yang dimasak, namun ia juga butuh ilmu pengetahuan dan organisasi. Dalam menyikapi pandangan modern Hajinah menggunakan logika rasional (contoh es yang membeku atau perdagangan internasional) untuk meyakinkan audiens bahwa persatuan adalah "alat" atau "senjata" untuk mencapai kemakmuran. Ini adalah pendekatan modern: organisatoris dan pragmatis.

Kongres Perempuan 1928 tidak dapat dipungkiri merupakan arena pertemuan berbagai faksi. Yakni faksi sekuler nasionalis dan faksi agama. Siti Hajinah, yang mewakili Aisyiyah yang merupakan sayap perempuan Muhammadiyah, membawa warna religius namun progresif.

Sementara peserta kongres lain, misalnya Siti Sundari tegas menolak poligami, Hajinah lebih berhati-hati dalam isu hukum keluarga agar tidak berbenturan dengan syariat. Ia lebih fokus pada pendidikan perempuan. Hajinah mengambil jalan tengah dengan menekankan bahwa "perbedaan pengetahuan dapat diakurkan." Ini adalah upaya diplomatik untuk menjaga agar kongres tidak pecah karena perbedaan pandangan agama.

Dibandingkan dengan Siti Sundari yang berpidato dalam bahasa Belanda, Sundari jauh lebih radikal dalam menuntut kesetaraan hukum dan pendidikan bagi perempuan. Jika Hajinah bicara tentang "persatuan sebagai tubuh," Sundari bicara tentang "perempuan sebagai pilar bangsa" yang harus berdaya secara intelektual agar bangsa tidak runtuh.

Pidato Ny. Kho Khoen Tiang yang mewakili suara peran perempuan dalam ekonomi dan sosial yang lebih praktis. Pidato Hajinah lebih bersifat filosofis-integratif. Ia tidak langsung menyerang

institusi perkawinan atau tradisi tertentu, melainkan membangun argumen tentang pentingnya "berkelompok" untuk bertahan hidup.

Secara sosiologis, pidato Hajinah mencerminkan teori Solidaritas Organik dari Émile Durkheim, di mana masyarakat modern bersatu justru karena mereka berbeda-beda fungsi dan saling membutuhkan. Hajinah menerapkan konsep ini dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Kesimpulan

Siti Hajinah berhasil merajut nilai-nilai kemanusiaan universal dengan kepentingan nasionalisme yang mendesak. Melalui pidatonya, ia memberikan landasan filosofis bahwa persatuan bukanlah penyeragaman, melainkan kerja sama yang erat antar bagian yang berbeda demi satu tujuan besar yaitu keselamatan dan kemerdekaan bangsa. Semangat persatuan ditunjukkan juga dengan sikap Siti Hajinah yang lebih memilih untuk mengambil jalan tengah di tengah faksi faksi yang hadir dalam kongres. Kehatian-hatiannya menyampaikan isu-isu yang berseberangan dengan ajaran Islam juga menunjukkan upayanya untuk lebih mencari persamaan dari pada perdebatan.

Referensi

- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Blackburn, S. (2007). *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Sejarah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kowani. (2008). *Sejarah Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Kongres Wanita Indonesia.
- Martyn, E. (2005). *The Women's Movement in Post-colonial Indonesia: Gender and Nation*. Routledge.
- Mu'arif dan Hajar Nur Setyowati (2014) *Srikandi-Srikandi Aisyiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Pringgodigdo, A. K. (1994). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Dian Rakyat.
- Vreede-de Stuers, C. (2008). *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Wieringa, S. E. (2002). *Sexual Politics in Indonesia*. Palgrave Macmillan.
- Wieringa, S. E. (2010). *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Galang Press.